PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBUANG SAMPAH YANG TIDAK PADA TEMPATNYA DI LINGKUNGAN WISATA TAMAN PANCING DESA ADAT PEMOGAN

Agustinus Ngongo Malo

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Email: gustimalo44@gmail.com

Abstrak

Penanganan sampah sampai saat ini masih menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah kota sehingga diperlukan perhatian khusus terhadap permasalahan sampah untuk segera diselesaikan pada saat ini. Permasalahan sampah mengkhawatirkan khususnya di Lingkungan Wisata Taman Pancing Desa Adat Pemogan, Provinsi Bali yang dikenal dengan wilayah pariwisata sehingga penting untuk diteliti mengapa sampah masih menjadi permasalahan yang sangat krusial dengan perkembangan pembangunan pada umumnya di wilayah Bali. Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah antara lain: Bagaimana sikap kepedulian masyarakat terhadap Lingkungan Wisata Taman Pancing Desa Adat Pemogan, dan Bagaimana penegakan hukum dan penerapan sanksi terhadap pelaku yang membuang sampah tidak pada tempatnya di Lingkungan Wisata Taman Pancing Desa Adat Pemogan. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dan penelitian bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik observasi dan teknik wawancara. Terakhir penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data analisis data kualitatif. Semua data penelitian yang terkumpul dikaji dengan menggunakan beberapa teori atau konsep-konsep yakni teori penegakan hukum dan kepastian hukum. Penelitian ini merupakan hasil sebagai berikut: (1) melalui partisipasi aktif dalam kegiatan pembersihan, pengelolaan sampah, penyuluhan tentang kebersihan lingkungan hidup, menciptakan lingkungan yang bersih, dan ramah lingkungan wisatawan maupun penduduk lokal. (2) Denda dan penerapan sanksi sosial seperti meminta pelaku untuk membersihkan area yang mereka kotori sebagai bentuk tanggung jawab pelaku.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penerapan Sanksi, Kepedulian Masyarakat Terhadap Kebersihan Lingkungan

Abstract

Waste management has remained a problem for the city government up to this point, necessitating extra care in order to find solutions. A very important issue following for the growth of regional development, particularly in taman pancing regency. The following issues can be identified based on the background of the problem as state above: How caring attitude society towards environmental hygiene on the lingkungan wisata taman pancing desa adat Pemogan; and how law enforcement and application of sanction towards the perpetrator trash disposer not in place environment on the lingkungan wisata taman pancing desa adat Pemogan. Empirical legal research is the kind that was used, and it was descriptive in nature, primary and secondary data are the sources of the information used. Observational methods and interview methods are used by the outhors of this study to collect data. Last but not least, this study analyzed qualitative data using data processing techniques. Data collection technique which the outhers uses in research studied using a number theory or concept ie law enforcement theory and legal certainly. Study used as follows : (1) through participation active in activities waste management cleaning, counseling environmental cleanliness, create a clean environment, and environmentally friendly tourist and local . (2) fines and application of sanctions social like asking asked the perpetrator clean area the perpetrator of the dirt as shapes perpetrator's responsibility.

Key Words: *law enforcement, application of sanctions, community concern to environmental cleanliness*

1. PENDAHULUAN

Masalah sampah di Indonesia merupakan masalah yang sangat kompleks karena kurangnya pengertian masyarakat terhadap akibat-akibat yang ditimbulkan oleh sampah.¹ Faktor lain yang menyebabkan permasalahan sampah di Indonesia yang semakin rumit adalah meningkatnya taraf hidup masyarakat yang tidak disertai dengan keselarasan pengetahuan tentang persampahan dan juga partisipasi masyarakat yang kurang untuk memelihara kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Pada dasarnya sampah merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia atau proses-proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomi, bahkan mempunyai nilai yang negatif karena dalam penanganannya, baik untuk membuang maupun membersihkannya memerlukan biaya yang cukup besar.

Sampah merupakan material sisa yang sudah tidak digunakan lagi. Sampah sendiri adalah masalah bagi setiap warga negara karena selalu dihasilkan setiap harinya dan sepanjang tahun salah satunya negara Indonesia sebagai negara penyumbang sampah terbanyak di dunia. Masalah sampah yang actual sejak lama bagi Indonesia terutama di perkotaan. Pertumbuhan penduduk yang tinggi, kondisi sosial, budaya, ekonomi masyarakat, serta meningkatnya kegiatan pembangunan di berbagai sektor merupakan faktor yang mempengaruhi jumlah timbulan sampah. Besarnya jumlah penduduk dan keberagaman aktivitas di kota-kota Indonesia, mengakibatkan munculnya persoalan umum pelayanan prasarana perkotaan, termasuk permasalahan sampah.

Pemerintah bertugas untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan persampahan yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Tahap-tahap penanganan sampah meliputi pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengelolaan sampah, dan pemrosesan akhir sampah.

Terkait dengan persampahan telah terdapat beberapa kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah sampah dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai daya dukung untuk mendukung kehidupan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.

Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang menyebutkan “Pemerintah daerah harus membuat perencanaan penutupan /*closing* pada tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) yang menggunakan sistem terbuka paling lama satu tahun terhitung sejak berlakunya undang-undang ini”. Pasal 1 (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang berbunyi “bahwa sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Berdasarkan hal ini pengelolaan sampah memang butuh pengelolaan khusus karena sifatnya yang susah terurai.

Di daerah Bali permasalahan pengelolaan sampah diatur dalam peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang sampah. Dalam peraturan Gubernur ini diatur tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan sampah dengan cara pembatasan timbulan sampah (*reduce*) pemanfaatan kembali sampah (*reuse*) dan pendauran ulang sampah (*recycle*) dan penanganan sampah dengan cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan, pemrosesan akhir sampah. Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan budaya bersih, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, meningkatkan kesehatan masyarakat, menjadikan sampah bernilai ekonomi, dan meningkatkan peran

¹ Bisri, Ilahni, 2015, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip Implementasi Hukum Indonesia, Grafindo Persada*, Jakarta, hlm. 10.

produsen, terutama di Lingkungan Wilayah Taman Pancing Desa Adat Pemogan. Menangani persoalan sampah tentu perkara tidak mudah lagi bagi pemerintah kabupaten/kota karena semakin meningkatnya jumlah penduduk yang akan diimbangi hasil produksi sampah baik itu sampah (domestik) maupun (non-domestik). Pengelolaan sampah merupakan pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, dan daur ulang untuk menunjang dampak yang baik pada lingkungan, kesehatan kebersihan serta keindahan.

Permasalahan sampah hingga saat ini sangat mengkhawatirkan khususnya bagi masyarakat Desa Adat Pemogan penumpukan sampah di tempat pembuangan akhir menimbulkan keterlambatan pengambilan sampah di rumah-rumah sehingga berdampak pada citra provinsi Bali yang dikenal dengan wilayah pariwisata sehingga penting untuk diteliti mengapa sampah menjadi permasalahan yang sangat krusial dalam perkembangan dan pembangunan daerah khususnya di Desa Adat Pemogan.

Menurut Chusnul Chotimah, sampah adalah akhir dari olahan rumah. Pembuangan sampah ini akan menjadi ancaman bagi lingkungan dan masyarakat.² Jika sampah dibuang di tempat yang tidak sesuai dengan tempatnya maka hal ini akan merugikan masyarakat sekitar khususnya di wilayah Taman Pancing Desa Adat Pemogan. Banyak hal yang akan terjadi jika kebiasaan membuang sampah tidak pada tempatnya karena akan merugikan masyarakat lain dan mengganggu kenyamanan tempat tinggal masyarakat. Sampah dan pengolahannya kini menjadi masalah yang kian mendesak di wilayah tersebut. Penanganan sampah dan pengendalian persampahan kini menjadi kompleks yang rumit dan semakin bertambahnya jumlah penduduk serta aktivitas penduduk tersebut. Pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah.³

Pembagian tanggung jawab sampah dalam pengelolaannya dibedakan menjadi dua, (1) pengelolaan sampah dari sumber ke TPS menjadi tanggung jawab masyarakat (2) pengelolaan sampah dari TPS ke TPA menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. (*Peraturan Menteri Dalam Negeri 33 Tahun 2010*). kegiatan pengelolaan sampah yang menjadi tanggung jawab masyarakat adalah (1) kegiatan pewadahan dan pemilahan sampah di sumber, (2) pengolahan sampah skala masyarakat di sumber, (3) pengumpulan sampah di sumber ke TPS. Sedangkan kegiatan pengolahan sampah permukiman yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yaitu, (1) penampungan sampah berupa TPS, (2) pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, (3) pengolahan sampah skala kota, (4) pemrosesan akhir sampah.

Sebagian besar masyarakat di kota maupun pedesaan memiliki kebiasaan membuang sampah di selokan, pinggir jalan, bahkan di taman kota. Dari kebiasaan inilah menimbulkan dampak dari sampah sehingga menimbulkan berbagai masalah di berbagai lingkungan akibat sampah yang dibuang sembarangan. Hal ini dapat mengancam keberlanjutan lingkungan dan kesehatan masyarakat Desa Adat Pemogan akibat sampah yang tidak dibuang pada tempatnya karena dapat mencemari udara, air, dan tanah.

Pengelolaan sampah dapat didasarkan pada beberapa alasan yang penting. Pertama, isu pengolahan sampah menjadi kritis dengan pertumbuhan populasi dan lingkungan. Kedua, penanganan terhadap sampah dapat memiliki dampak langsung terhadap berkelanjutan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Ketiga, penelitian dapat memberikan solusi atau inovasi praktis meningkatkan metode pengolahan sampah yang lebih ramah lingkungan dan efisien.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian tentang **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembuang Sampah Yang Tidak Pada Tempatnya di Lingkungan Wisata Taman Pancing Desa Adat Pemogan”**

² Chusnul Chotimah, 2020, *Sampah adalah Akhir dari Olahan Rumah Buangan Sampah yang menjadi Ancaman Bagi Lingkungan dan Masyarakat*.

³ Hartono, Rudi, 2013, *Penanganan dan Pengelolaan Sampah*, Penebar Swadaya, Bogor, hlm.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sikap kepedulian masyarakat terhadap Lingkungan Wisata Taman Pancing Desa Adat Pemogan? dan bagaimana penegakan hukum dan penerapan sanksi terhadap pelaku yang membuang sampah tidak pada tempatnya di Lingkungan Wisata Taman Pancing Desa Adat Pemogan?

2. METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris. Hukum penelitian empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.⁴ Data dalam penelitian hukum empiris terdiri atas data primer dan data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif, dimana penelitian ini mendeskripsikan peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang sampah. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dan wawancara. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan metode wawancara yaitu dengan membuat pertanyaan pokok lanjutan dan disusun sesuai dengan perkembangan wawancara.⁵ Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang disajikan secara deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan Umum Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembuang Sampah yang tidak pada tempatnya di Lingkungan Wisata Taman Pancing Desa Adat Pemogan

Penegakan hukum merupakan suatu proses melaksanakan upaya untuk berfungsinya suatu norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku yang berkaitan dengan hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tugas utama dari penegakan hukum adalah mewujudkan keadilan, sehingga dengan adanya penegakan hukum dapat menghasilkan hukum yang menjadi kenyataan.⁶

Penegakan hukum merupakan suatu proses dalam rangka mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, sehingga terdapat tiga unsur yang terlibat dalam proses penegakan hukum itu, diantaranya: (1) Unsur pembuatan Undang-Undang (lembaga legislative); (2) Unsur penegakan hukum (polisi, jaksa, hakim); (3) Unsur lingkungan meliputi pribadi warga negara dan sosial. Menurut Mertokusumo sebagaimana dikutip Gatot P. Soemartono, bahwa penegakan hukum bermakna bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam pelaksanaan harus memperhatikan tiga unsur : (1) kepastian hukum; (2) kemanfaatan hukum; (3) keadilan. Penegakan hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Dalam pasal 27 ayat 1 “segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Penegakan hukum memiliki beberapa konsep dasar, yakni: kepatuhan, keadilan, transparansi, proporsionalitas, kemanfaatan.

Pada umumnya sampah merupakan sisa atau hasil dari kegiatan manusia sehari-hari yang tidak lagi bisa dimanfaatkan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat yang berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.

Jenis sampah yang ada di sekitar kita cukup beraneka ragam, ada yang berupa sampah rumah tangga, sampah industri, sampah pasar, sampah rumah sakit, sampah perkebunan, sampah peternakan, sampah intitusi / kantor / sekolah, dan sebagainya. Berdasarkan asalnya, sampah padat digolongkan sebagai berikut: sampah organik, sampah anorganik dan Sampah B3 (Bahan, Beracun, dan Berbahaya). Pengolahan sampah adalah upaya mengurangi volume

⁴ Ashofa Burhan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 172.

⁵ Moh. Nazir, 2008, *Metedologi Penelitian. Gahlia Indonesia*, Jakarta. Hlm. 20

⁶ Undang-Undang Dasar Pasal 1 ayat 3 yaitu: *Negara Indonesia adalah Negara Hukum*

sampah atau merubah bentuknya menjadi lebih bermanfaat. Dari sebagian kemajuan teknologi jumlah sampah juga meningkat.⁷

Pelaku adalah orang yang melakukan suatu pelanggaran atau ketentuan yang berlaku dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang istilah “pelaku” dapat merujuk pada orang yang melakukan tindakan criminal atau perbuatan melawan hukum yang memiliki konsekuensi hukum.⁸ Berdasarkan pasal 31 huruf e dinyatakan bahwa setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempatnya yang telah ditentukan dan disediakan. Dalam pasal 50 ayat 3 menyatakan setiap orang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf e diancam pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak 15.000.000 (lima belas juta).

3.2 Sikap Kepedulian Masyarakat Terhadap Lingkungan Wisata Taman Pancing Desa Adat Pemogan

Sikap pengunjung yang mengotori Lingkungan Wisata Taman Pancing Desa Adat Pemogan bisa sangat merugikan. Pengunjung seharusnya bertanggung jawab terhadap lingkungan yang mereka kunjungi. Sikap yang diharapkan antara lain: menjaga kebersihan, menghormati alam, daur ulang dan mengurangi limbah, Pendidikan dan kesadaran, dan menjunjung etika lokal. Sikap yang bertanggung jawab dari pengunjung akan membantu menjaga keindahan dan kelestarian Lingkungan Wisata Taman Pancing Desa Adat Pemogan untuk dinikmati oleh generasi mendatang.

Ditinjau dari peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber bahwa masyarakat Desa Adat Pemogan dalam mengelola sampah belum maksimal karena dari banyaknya sarana dan fasilitas pembuangan sampah masih terjadi penumpukan sampah, disisi lain ada juga masyarakat yang peduli terhadap kebersihan lingkungan hidup. Masyarakat yang memiliki kepedulian tersebut adalah mereka yang sering kali aktif kegiatan pembersihan, dan public lainnya. Seperti kesadaran akan pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang lebih baik. Pengelolaan sampah berbasis sumber adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan sampah dengan cara pembatasan timbulan sampah (*reduce*), pemanfaatan kembali sampah (*reuse*) dan pendauran ulang sampah (*recycle*) dan penanganan sampah dengan cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Peraturan Gubernur ini bertujuan mewujudkan budaya bersih, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, meningkatkan kesehatan masyarakat, menjadikan sampah bernilai ekonomi, dan meningkan peran produsen, desa adat, atau kelurahan dalam pengelolaan sampah.

Sampah bukan musibah bila mampu dikelola dengan baik, berbagai program pengurangan sampah seperti reused, reduce, dan recycle adalah salah satu contohnya seperti yang diterapkan oleh peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang pengolahan sampah berbasis sumber. Program tersebut memerlukan kesadaran dari semua aspek masyarakat kalangan. Upaya dalam mengurangi sampah tidak akan terlaksana dan terwujud dengan baik jika tidak didukung oleh kesadaran masyarakat. Masyarakat harus berpartisipasi untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Berikut adalah aktifitas kepedulian masyarakat terhadap Lingkungan Wisata Taman Pancing Desa Adat Pemogan, yaitu : 1) Sikap kepedulian terhadap kebersihan lingkungan melibatkan kesadaran akan dampak negatif dari polusi dan sampah terhadap ekosistem dan kesehatan manusia. Hal ini mencakup tindakan membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan sampah plastic dan

⁷ Aditya Sapriallah, *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan*, Yogyakarta: Budi Utama, 2016, hal. 111

⁸ Ridwan HR, *Diskresi & Tanggungjawab Pemerintah*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014, hal. 113.

sejenis sampah lainnya dan partisipasi dalam kegiatan pembersihan lingkungan. Sikap tersebut juga melibatkan upaya untuk mendidik orang-orang lain tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Aktifitas sederhana yang pertama yakni membuang sampah pada tempatnya. 2) Sikap kepedulian terhadap pemilahan sampah melibatkan kesadaran akan pentingnya memisahkan sampah menjadi kategori yang sesuai seperti sampah organik, dan sampah anorganik. Ini membantu dalam proses daur ulang dan pengelolaan sampah yang lebih efisien, serta mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan. Melakukan pemilahan sampah dengan benar adalah langkah yang konkret dalam mendukung keberlanjutan dan menjaga kebersihan lingkungan.

Dalam kehidupan sehari-hari penumpukan sampah dapat berakibat muncul penyakit yang dapat mempengaruhi kesehatan lingkungan dan masyarakat. Tahukah kamu, sampah yang sering ditemukan di setiap wilayah adalah sampah plastik dan hal ini dapat berbahaya jika tidak segera ditanggulangi baik itu berupa kebijakan maupun dukungan infrastruktur. Sampah-sampah plastik ini berada di urutan kedua sampah terbanyak setelah sampah kertas di beberapa daerah atau sekitar 15% dari sampah perhari adalah sampah plastik.⁹

Adapun upaya pemerintah dalam optimalisasi pelaksanaan peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di beberapa tempat wisata lainnya yaitu dengan melakukan sosialisasi secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung dengan cara terjun langsung ke lapangan yaitu pada masing-masing wisata yang ada di sekitar desa adat Pemogan, menghimbau masyarakat untuk terkait membuang sampah pada tempatnya dan mendaur ulang sampah dan secara tidak langsung dengan mengumumkan melalui media sosial dan media cetak. Selain itu masyarakat Desa Adat Pemogan telah melakukan beberapa upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan peraturan Gubernur tersebut.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Pasal 1 ayat (2) adalah upaya yang sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Permasalahan-permasalahan lingkungan di Lingkungan Wisata Taman Pancing Desa Adat Pemogan begitu kompleks dan membutuhkan penanganan yang intensif guna mengatasi berbagai masalah yang menghinggapi setiap elemen yang menghuni pariwisata Bali. Dibutuhkan ilmu lingkungan yang baik pula demi penanganan masalah-masalah lingkungan ini agar tidak menimbulkan permasalahan baru.

3.3 Penegakan Hukum dan Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Pembuang Sampah yang tidak pada Tempatnya di Lingkungan Wisata Taman Pancing Desa Adat Pemogan

Berdasarkan Pasal 28H ayat (10) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan berhak mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Menurut Sony Keraf, terdapat hubungan erat antara penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, penyelenggaraan pemerintah yang baik akan mempengaruhi dan menentukan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban menjamin terciptanya lingkungan yang baik dan sehat bagi warga negaranya, yakni lingkungan yang terbebas dari berbagai permasalahan lingkungan yang salah satunya adalah sampah.

Pemerintah mengatasi permasalahan sampah dengan menyelenggarakan pengelolaan sampah melalui pembentukan payung hukum berupa Undang-Undang Nomor 18 Tahun

⁹ Enri Damanhuri, *Pengelolaan Sampah Terpadu*, Edisi Kedua, ITB Press, Bandung: 2015, hal. 27.

2008 tentang Pengelolaan Sampah (UU No. 18 Tahun 2008). Mengacu pada pasal 5 UU No. 18 Tahun 2008, bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, berkesinambungan, yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pada bagian penjelasan UU No. 18 Tahun 2008 dijelaskan bahwa undang-undang ini dibentuk dalam rangka: 1) Kepastian hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. 2) Ketegasan mengenai larangan memasukkan atau mengimpor sampah kedalam wilayah Negeri Kesatuan Republik Indonesia. 3) ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. 4) Kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah, dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. 5) Kejelasan antara pengertian sampah yang diatur dalam undang-undang ini dan pengertian limbah sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Implementasi tersebut dibuktikan dengan dibentuknya peraturan pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (PP No. 81 Tahun 2012). Peraturan pemerintah ini menjadi landasan terselenggaranya pengelolaan sampah di Indonesia, khususnya di wilayah Provinsi Bali. Lalu berdasarkan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014) bahwa daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pasal ini mempertegas kewenangan pemerintah daerah dalam membuat suatu peraturan daerah.

Adapun penjelasan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang urusan pemerintahan daerah dijelaskan bahwa urusan pemerintahan terdiri dari absolute dan konkuren. Urusan Pemerintah Absolut adalah urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, sedangkan urusan Pemerintahan Konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan pilihan yang dibagi antara pemerintah pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota. Urusan Pemerintahan wajib dibagi dalam urusan pemerintah terkait pelayanan dasar dan dan urusan pemerintah wajib yang tidak terkait pelayanan dasar.

Berkembangnya pembangunan pariwisata di provinsi Bali tidak hanya mengakibatkan dampak positif seperti peningkatan daerah, peningkatan kesejahteraan dan menciptakan lapangan kerja. Selain itu, dapat menimbulkan dampak negatif seperti pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dimana hal tersebut akan berpengaruh pada kelangsungan hidup manusia. Kepariwisata di Provinsi Bali khususnya di wisata lingkungan taman pancing desa adat Pemogan kini keberadaanya telah memberikan tekanan terhadap lingkungan akibat sampah organik dan anorganik yang dihasilkan, kegiatan di wilayah ini menghasilkan berbagai macam sampah baik sampah organik, anorganik, maupun sampah yang berbahaya lainnya. Salah satu upaya pemerintah Provinsi Bali terutama di kalangan masyarakat Desa Adat Pemogan yaitu dengan mengeluarkan peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.

Penyebab terjadinya pencemaran lingkungan diantaranya yaitu sampah yang dibuang tidak pada tempatnya, berantakan sehingga membuat pemandangan tidak terlihat indah bahkan menimbulkan berbagai penyakit yang dapat mengganggu kesehatan lingkungan dan masyarakat. Dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan wisata. Meskipun peraturan perundang-undangan telah diterapkan oleh perintah sebagai upaya untuk melindungi lingkungan dari pencemaran akibat sampah. Penegakan hukum terhadap pelaku pembuang sampah yang tidak pada tempatnya di lingkungan wisata taman pancing desa adat Pemogan melalui berbagai langkah, seperti: 1) Penegakan hukum peraturan Daerah: Desa adat Pemogan sudah menegakkan peraturan-peraturan lokal yang mengatur tentang pembuangan sampah, sanksi bagi pelanggar. 2) Pengawasan Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam pengawasan terhadap pembuangan sampah illegal atau tidak sesuai aturan dapat membantu dalam penegakan hukum. 3) Patroli dan Inspeksi Rutin: Pemerintah desa

dapat melakukan patrol dan inspeksi rutin untuk membantu kegiatan pembuangan sampah serta memberikan sanksi kepada pelanggar. 3) Edukasi dan Kesadaran: Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik melalui program edukasi juga penting dalam mencegah pelanggaran. Dan 4) Kerjasama dengan Pihak Terkait: Desa adat Pemogan dapat bekerja sama dengan pihak terkait seperti kepolisian atau dinas lingkungan hidup untuk memperkuat penegakan terhadap pelaku pembuang sampah illegal.

Salah satu cara menciptakan lingkungan yang baik dan sehat adalah dengan menyelenggarakan pengelolaan sampah dibentuklah suatu peraturan yang menjadi payung hukum pengelolaan sampah di Indonesia yakni Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu kegiatan yang mensejahterakan suatu nilai yang tertuang pada suatu kaidah yang kuat dan tidak goyah serta memiliki sikap sebagai suatu analisis nilai akhir dalam rangka menciptakan, memelihara, dan mempertahankan suatu kedamaian pergaulan masyarakat yang hidup dan konsisten.

Pemerintah terus mengupayakan adanya keseimbangan antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup. Salah satu produk hukum terbaru yang disahkan oleh pemerintah adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam menjaga kebersihan lingkungan hidup khususnya di Lingkungan Wisata Taman Pancing Desa Adat Pemogan adalah pembentukan kelembagaan. Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam menjaga kebersihan dan keasrian Lingkungan Wisata Taman Pancing Desa Adat Pemogan antara lain: (1) Program pengelolaan sampah yang terpadu, termasuk pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan sampah. (2) Penyediaan tempat pembuangan sampah yang teratur dan dikelola dengan baik.¹⁰ (3) Penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan cara-cara pengelolaan sampah yang benar. (4) Kampanye Pembersihan lingkungan, seperti program gerakan kebersihan atau gotong royong secara rutin. dan (6) Pengawasan dan penegakan peraturan terkait lingkungan dan kebersihan, termasuk penegakan sanksi bagi pelanggar.

4. PENUTUP

4.1 Simpulan

Pengelolaan sampah berdasarkan peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber terlihat bahwa upaya masyarakat Desa Adat Pemogan dalam mengelola sampah belum maksimal karena dari banyaknya sarana dan fasilitas pembuangan sampah masih terjadi penumpukan sampah, di sisi lain juga jumlah tempat pembuangan sampah sudah disediakan oleh pemerintah daerah tetapi masih saja terjadi, penumpukan sampah sehingga hal ini menjadi suatu kendala dalam pelaksanaan peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Lingkungan Wisata Taman Pancing Desa Adat Pemogan.

Penerapan sanksi terhadap pelaku pembuang sampah di Lingkungan Wisata Taman Pancing Desa Adat Pemogan berdasarkan peraturan yang berlaku bahwa penerapan sanksinya sudah berlaku sudah sesuai dengan tugas pokok fungsi dan kewenangan yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) dengan melakukan tindakan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Mekanisme penanganan pemberian sanksi administrasi bagi pelanggar diberikan surat Teguran 1 selama tiga kali teguran. Jika terulang hal yang sama maka akan di tindak lanjuti dan akan dibuatkan Berita Acara Pidana (BAP) untuk diajukan ke pengadilan Negeri Denpasar. melalui Sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring).

¹⁰ Syafrudin, Ateng, 2012, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penegakan hukum terhadap pelaku pembuang sampah yang tidak pada tempatnya di Lingkungan Wisata Taman Pancing Desa Adat Pemogan terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan, diantaranya: (1) Diharapkan masyarakat lebih meningkatkan kesadaran diri dengan membuang sampah yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam kondisi seperti ini agar masyarakat hidup sehat, bersih dan nyaman tidak adanya sumber-sumber penyakit didalam kehidupan yang menjadikan lingkungan yang bersih dan damai. (2) Instansi Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) diharapkan lebih meningkatkan lagi dalam hal pemberian sanksi administrasi maupun sanksi pidana yang dapat menimbulkan efek jera terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aditya Sapriallah, 2016, *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan*, Yogyakarta: Budi Utama
- Albert Napitupulu, 2013, *Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan*, Bogor: IPB Press.
- Ashofa Burhan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Bagong, Suyato. 2008, *Gerakan Pengelola Sampah*. Jakarta : PT Prima Infosarana Media.
- Bisri, Ilahni, 2015, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip Implementasi Hukum Indonesia*, Jakarta : Grafindo Persada.
- Chusnul Chotimah, 2020, *Sampah adalah Akhir dari Olahan Rumah Buangan Sampah yang menjadi Ancaman Bagi Lingkungan dan Masyarakat*.
- Enri Damanhuri, 2015, *Pengelolaan Sampah Terpadu*, Edisi Kedua, Bandung : ITB Press.
- Gatot P. Soemartono, 2014, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, Rudi, 2013, *Penanganan dan Pengelolaan Sampah*, Bogor : Penebar Swadaya,
- Moh. Nazir, 2008, *Metedologi Penelitian*. Jakarta : Gahlia Indonesia.
- Muhammad Erwin., *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Bandung : Refika Adytama.
- Ridwan HR, 2014, *Diskresi & Tanggungjawab Pemerintah*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Sudrajat. 2006. *Mengelola Sampah Kota*. Bogor : Penebar Swadaya.
- Supriatna J. 2008. *Melestarikan Alam Indonesia*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Suwarjo dkk,2014, *Pengelolaan Sampah Organik dan Non organic*, Universitas Yogyakarta.

Jurnal

- Dewi Trinaya A.A.M.A, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari Berbagai Perspektif Keilmuan*. Bali, Dwijendra University.
- Putera Semadi, A.A.Gde, *Peran Media Sosial Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*. Bali, Dwijendra University.
- Nurhenu Karuniastut, 2011, *Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan dan Lingkungan*, Jurnal Jenis Plastik, Kode Plastik, Penyalahgunaan Limbah Plastik, vol. 03.No 01

Suandi, I Wayan. 2010. *Eksistensi kebijakan public dan Hukum Dalam Pemerintahan Daerah*. Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana Bali. Vol. I No. 01. Tahun 2010.

Syafrudin, Ateng, 2012, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*, jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengolahan Sampah Berbasis Sumber.